



**MEMBANGUN  
IKN DARI**

**AKAR**

**PEMBERDAYAAN INKLUSIF**

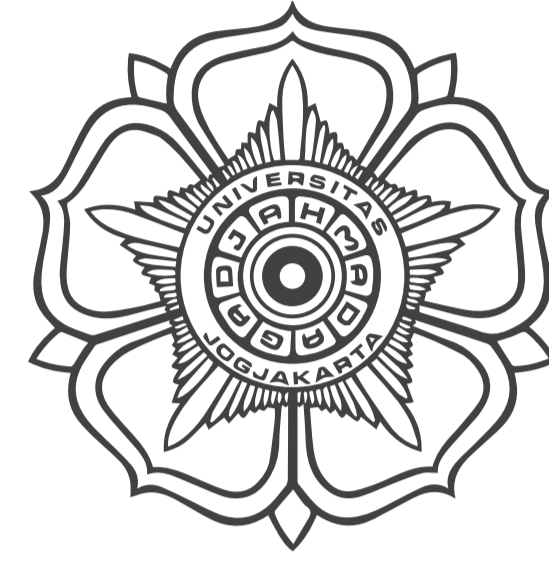
*Masyarakat Lokal dan Migran*

---

A part of the Colaboration Research on **Following Frontiers of the “Forest City”** :  
**Towards Sustainable and Inclusive Urbanization in Kalimantan and Beyond**



**Utrecht  
University**



**UNIVERSITAS  
GADJAH MADA**



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization

**IHE  
DELFT**

Institute for  
Water Education  
in partnership with UNESCO



**itk**  
Institut  
Teknologi  
Kalimantan



**Royal  
HaskoningDHV**  
Enhancing Society Together



**BRIN**  
BADAN RISET  
DAN INOVASI NASIONAL



*Supported by:*



**lpdp**



## **JUDUL POLICY BRIEF**

Membangun IKN dari Akar: Pemberdayaan Inklusif Masyarakat Lokal dan Migran

## **DIOLAH DARI PENELITIAN**

*“Pengukuran Dampak Sosial Ekonomi sebagai Akibat Pembangunan Kawasan Perkotaan, Perpindahan Penduduk, dan Perubahan Penghidupan Masyarakat di Ibu Kota Negara Baru Indonesia dan Sekitarnya”*

**TIM PENULIS** Erlis Saputra, Azis Musthofa, Maulidia Savira Chairani, Zahra Nur Afifah, Sephia Virginovaristha, Muhamad Rifki Rafida, Adji Saiddinullah, Hilary Reinhart, Alia Fajarwati, Puput Wahyu Budiman, R. Rijanta, Hafidz Wibisono, Mohammad Isnaini Sadali, Ari Susanti, Rosalina Kumalawati, Rahmat Aris Pratomo, Jany Tri Raharjo

**TIM PENELITI** Erlis Saputra, R. Rijanta, Ari Susanti, Alia Fajawati, Maulidia Savira Chairani, Azis Musthofa, Hilary Reinhart, Zahra Nur Afifah, Sephia Virginovaristha, Muhamad Rifki Rafida, Adji Saiddinullah, Muhammad Yuda Aditya, Rosalina Kumalawati, Puput Wahyu Budiman, Rahmat Aris Pratomo, Jany Tri Raharjo, Hafidz Wibisono, Agung Jauhari, Rizki Adriadi Ghiffari, Putri Khoirunisa, Mohammad Isnaini Sadali

**TATA LETAK DAN ILUSTRASI** Muhamad Rifki Rafida

## **SARAN PENGUTIPAN**

Saputra, Erlis, dkk. (2025). Membangun IKN dari Akar: Pemberdayaan Inklusif Masyarakat Lokal dan Migran. *Forest City Policy Brief*. Forest City Consortium: Work Package (WP) 3

Work Package 3

Konsorsium Riset Following Frontiers of the Forest City

The Netherlands dan Indonesia

Fakultas Geografi (FGE) Universitas Gadjah Mada

Sekip Utara, Bulaksumur

Yogyakarta 55281

<https://geo.ugm.ac.id/>

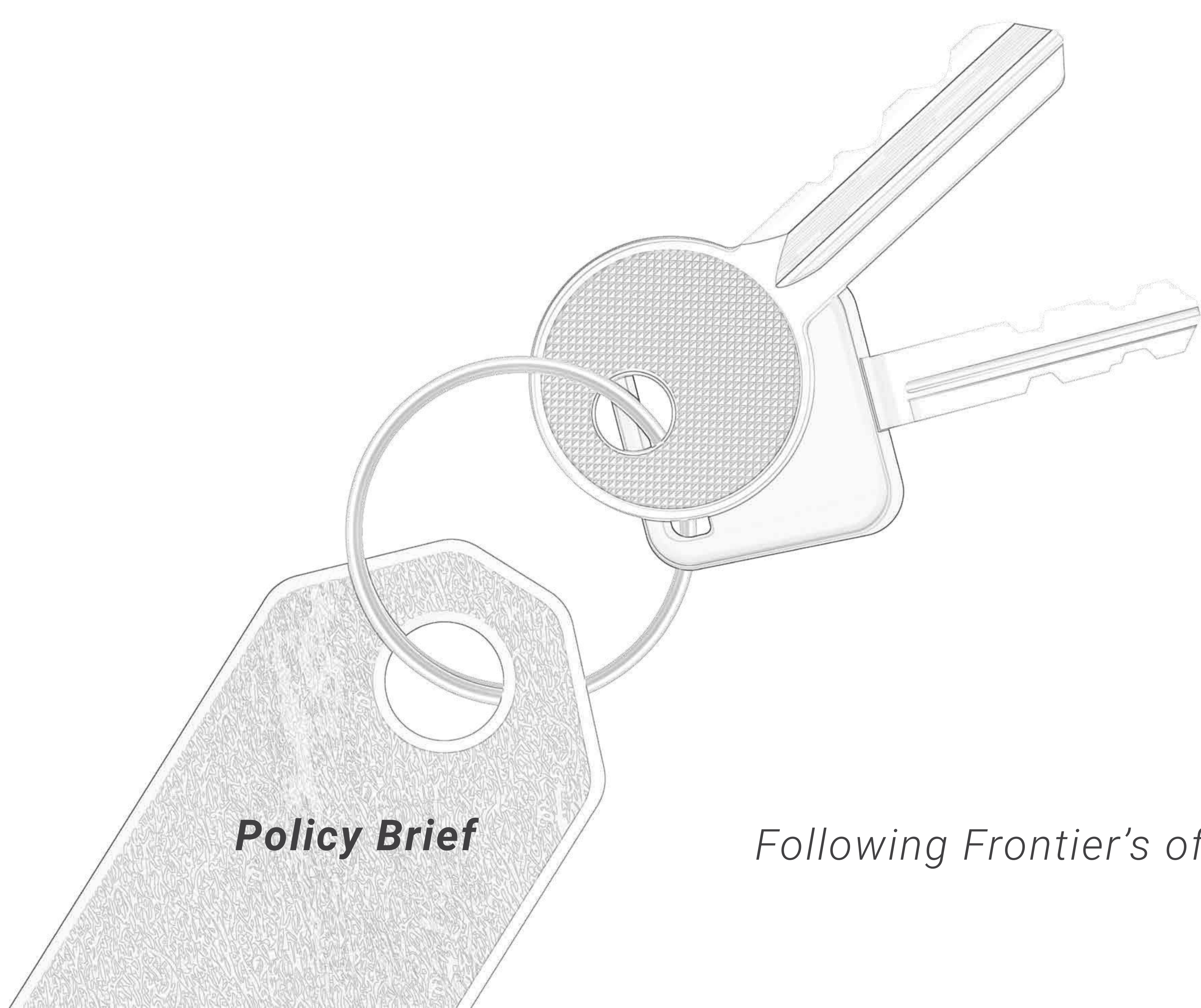
<https://forestcity.sites.uu.nl/>



**M**eski pemerintah pusat terus menggaungkan narasi inklusivitas dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), implementasi nilai-nilai tersebut masih belum tampak secara nyata dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Hingga saat ini, belum terdapat kebijakan asimetris yang dirancang secara khusus oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat lokal dan kelompok rentan dari dampak negatif urbanisasi dan pembangunan infrastruktur, khususnya terkait kebutuhan pengadaan lahan.

Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat terkait inklusivitas dalam pembangunan IKN dan dampak yang ditimbulkannya mencakup rendahnya kapasitas sumber daya manusia di kalangan masyarakat lokal, baik yang berada di dalam maupun di sekitar kawasan IKN; kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan ekonomi serta pengelolaan sumber daya lahan; dan terbatasnya akses terhadap pendampingan serta perlindungan dalam upaya pengembangan usaha masyarakat.



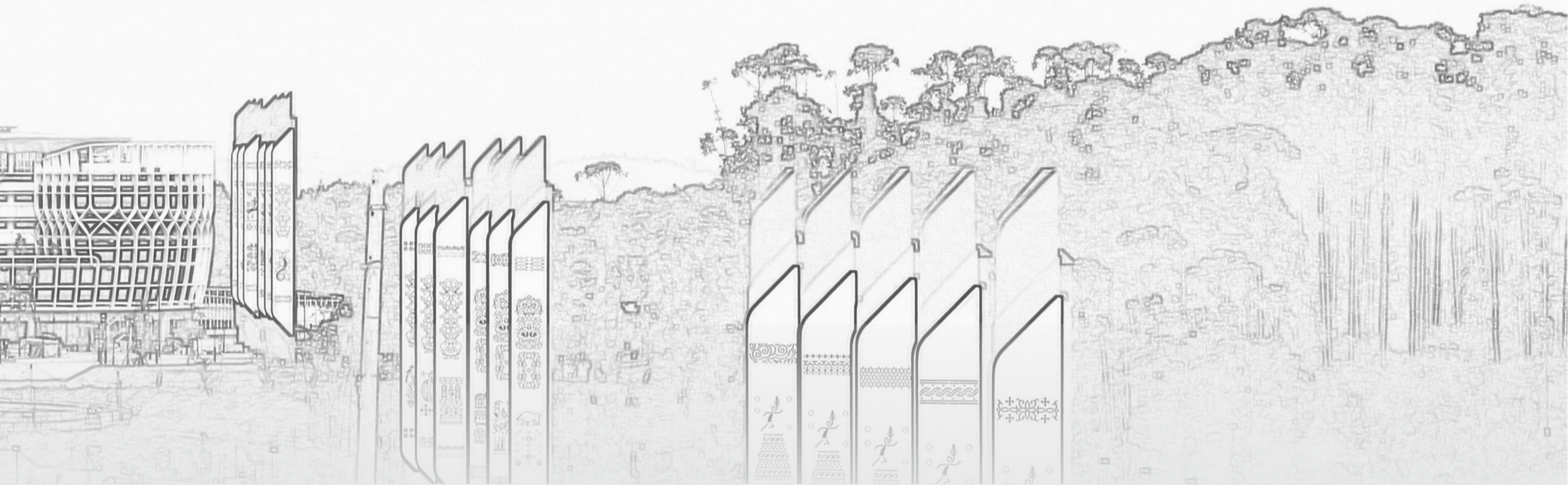


# RINGKASAN EKSEKUTIF

**P**embangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dampak signifikan bagi masyarakat lokal maupun pendatang, mencakup aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Perubahan ini tidak hanya membuka peluang untuk pengembangan wilayah, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam menjamin keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat<sup>1</sup>. Berdasarkan temuan riset Konsorsium IKN Forest City Indonesia – Netherlands tahun 2023, khususnya dalam *Work Package* (WP) 3<sup>23</sup>, diketahui bahwa masyarakat mengalami kesenjangan dalam akses pendidikan, ketidakpastian ekonomi yang disebabkan oleh alih fungsi lahan, serta minimnya dukungan terhadap pengembangan usaha. Tanpa kebijakan yang tepat sasaran, pembangunan IKN berpotensi menimbulkan eksploitasi sumber daya, marginalisasi, eksklusi sosial, dan ketimpangan ekonomi—hal-hal yang justru bisa menghambat tercapainya tujuan utama pemindahan ibu kota.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bersifat transformatif dan inklusif agar masyarakat lokal dan migran dapat berperan aktif serta memperoleh manfaat sebagai bagian tak terpisahkan dari ekosistem ibu kota baru.

Identifikasi lapangan yang dilakukan di tiga wilayah, yaitu Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN)<sup>4</sup> dengan sampel dari Kelurahan Sepaku, Desa Bukit Raya, Desa Sukaraja, Desa Bumi Harapan, dan Kelurahan Pemaluan; Kawasan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (KPIKN)<sup>5</sup> yang melibatkan Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kelurahan Muara Jawa Ulu, dan Kelurahan Dondang; serta wilayah di luar IKN (*beyond*) seperti Kelurahan Maridan dan Kelurahan Riko, mengungkap sejumlah persoalan. Di antaranya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, kesulitan dalam merespons perubahan ekonomi dan dinamika penggunaan lahan, serta terbatasnya akses terhadap dukungan dan perlindungan dalam pengembangan usaha masyarakat.



Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, kami menyusun lima rekomendasi yang diklasifikasikan berdasarkan kewenangan pemerintah, dengan pandangan bahwa kawasan IKN seharusnya menjadi pusat pertumbuhan yang mendorong pemerataan pembangunan di sekitarnya. Oleh karena itu, wilayah sekitar IKN tidak boleh tertinggal atau hanya menjadi penyedia sumber daya bagi kawasan kota. Rekomendasi pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan penguatan regulasi ketenagakerjaan. Kedua, mendukung masyarakat dalam menghadapi perubahan ekonomi dan penggunaan lahan melalui akses pembiayaan serta pelatihan. Ketiga, memperkuat perlindungan dan pendampingan bagi UMKM lokal melalui berbagai program dan skema yang mendukung pemanfaatan produk lokal dalam berbagai kegiatan.

Keempat, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor-sektor utama IKN, termasuk pengembangan kurikulum, insentif bagi institusi pendidikan yang bekerja sama dengan OIKN, serta integrasi sekolah alam berbasis budaya lokal.

Selain itu, pemberian beasiswa dan insentif untuk studi serta sertifikasi keterampilan bagi masyarakat lokal juga perlu diperluas. Kelima, menjaga stabilitas ekonomi masyarakat lokal melalui pendampingan dalam transisi ekonomi petani dan nelayan, pemberian insentif untuk UMKM lokal, serta program akselerasi usaha masyarakat. Tiga rekomendasi pertama ditujukan kepada Badan Otorita IKN (OIKN), sedangkan dua rekomendasi terakhir diarahkan kepada pemerintah daerah.



# PEMETAAN MASALAH

*Policy brief* ini mengangkat  
tiga persoalan utama

## 1. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia menjadi aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, kualitas tersebut merujuk pada tingkat pendidikan formal dan kapasitas pengetahuan masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan yang ditimbulkan oleh pemindahan ibu kota dan pembangunan IKN Nusantara. Masyarakat di kawasan IKN dan sekitarnya terdiri dari dua kelompok, yakni masyarakat lokal dan masyarakat migran. Masyarakat lokal merujuk pada komunitas adat seperti Suku Balik dan Suku Paser, sementara kelompok migran mencakup pendatang melalui program transmigrasi serta keturunannya, seperti Suku Jawa, Bugis, dan lainnya<sup>6</sup>.

Masyarakat lokal umumnya memiliki sifat yang tertutup dan cenderung menghindari interaksi dengan kelompok lain.

Namun, dengan hadirnya perusahaan dan program transmigrasi di wilayah tersebut, masyarakat lokal tidak memiliki banyak pilihan selain mencoba berbaur. Meski demikian, kecenderungan hidup berkelompok masih tampak, seperti terlihat pada masyarakat Suku Balik di Kelurahan Sepaku yang sebagian besar tinggal di satu lokasi, yaitu RT 3. Karakter tertutup ini membuat masyarakat lokal kurang terpapar informasi baru dan cenderung menghindari keramaian maupun perdebatan. Di samping itu, tingkat pendidikan formal masyarakat lokal umumnya lebih rendah dibandingkan pendatang, yang sebagian besar disebabkan oleh terbatasnya akses informasi dan lokasi permukiman mereka yang relatif jauh dari pusat aktivitas.

Sebaliknya, masyarakat migran umumnya lebih adaptif karena terbiasa mencari informasi untuk mempertahankan hidup di lingkungan yang baru. Hal ini membuat mereka lebih siap menghadapi dinamika pembangunan IKN Nusantara sebagai kota baru. Sebagian besar dari mereka juga telah memiliki bekal sebelumnya, termasuk semangat untuk melanjutkan pendidikan formal dan mengakses informasi. Meski demikian, ketersediaan fasilitas pendidikan di daerah ini masih terbatas. Jumlah penduduk yang tidak begitu besar membuat pendirian sekolah menengah atas di setiap kecamatan belum memungkinkan. Oleh karena itu, kebutuhan pendidikan jenjang ini hanya dapat dipenuhi di kota-kota besar terdekat seperti Balikpapan dan Samarinda.

## **2. Masyarakat Mengalami Kesulitan dalam Merespons Perubahan Ekonomi dan Aset Lahan**

Pemindahan ibu kota dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) membawa dampak besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat<sup>7</sup>, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Perubahan struktur ekonomi terasa nyata, khususnya bagi masyarakat lokal yang sebelumnya menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian dan perkebunan. Aktivitas utama mereka adalah pertanian ladang berpindah, namun praktik ini mulai ditinggalkan karena berkembangnya industri perkebunan dan larangan pemerintah terhadap pembukaan lahan dengan cara pembakaran.

Sebagai alternatif, masyarakat mulai menetap dan bercocok tanam di lahan warisan leluhur. Namun, belakangan ini banyak lahan yang terdampak atau bahkan sudah diambil alih untuk pembangunan IKN, sehingga akses terhadap lahan sebagai sumber penghidupan menjadi semakin terbatas<sup>8</sup>.

Perubahan ini menimbulkan 'shock' bagi masyarakat lokal. Mereka mengalami transisi yang cepat: dari pertanian berpindah ke pertanian menetap, lalu kini menghadapi kenyataan harus mencari sumber penghidupan baru karena lahan pertanian semakin sulit diakses. Bagi masyarakat yang terbiasa bergantung pada pertanian dan memiliki keterbatasan dalam pendidikan formal serta akses informasi, perubahan ini menjadi beban yang berat. Di sisi lain, masyarakat migran juga terdampak oleh berkurangnya lahan, mengingat banyak dari mereka juga bergelut di sektor pertanian dan perkebunan. Namun, karakteristik masyarakat migran berbeda dengan masyarakat lokal. Meski kehilangan lahan, mereka cenderung lebih cepat beradaptasi dan mampu melakukan diversifikasi usaha, seperti menyewakan tempat tinggal bagi pendatang atau membuka usaha penunjang lainnya. Hal ini didukung oleh tingkat kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya pendidikan formal, kemampuan mencari informasi, serta keberanian dalam mencoba jenis usaha di luar pertanian.

## **3. Terbatasnya Akses terhadap Pendampingan dan Perlindungan dalam Pengembangan Usaha**

IKN dirancang sebagai pusat pemerintahan masa depan yang tidak hanya menonjolkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, tetapi juga diharapkan mendorong transformasi sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Sebagai proyek strategis nasional, IKN ditargetkan menjadi pusat inovasi, investasi, serta model kota yang menjunjung prinsip keberlanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal maupun pekerja migran yang akan terlibat dalam proses pembangunannya<sup>9</sup>. Namun, dalam masa transisi ini, muncul tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya manusia. Tantangan utamanya adalah memastikan masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan perubahan, dan di sisi lain, tenaga kerja migran bisa terintegrasi secara adil tanpa memicu ketimpangan sosial.

Komunitas lokal di sekitar IKN, yang mayoritas berasal dari suku-suku asli Kalimantan dan telah lama bermukim di wilayah tersebut, kini menghadapi tekanan besar. Mereka yang selama ini bergantung pada ekonomi tradisional seperti pertanian, perikanan, dan usaha kecil berbasis komunitas dihadapkan pada ekspektasi bahwa pembangunan IKN akan membawa manfaat berupa pekerjaan, peluang usaha, dan peningkatan infrastruktur dasar. Namun kenyataannya, banyak dari mereka mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Beberapa bahkan tidak mampu bertahan, termasuk pelaku UMKM lokal yang kini harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar yang akan masuk ke wilayah IKN. Keterbatasan akses terhadap pendanaan dan infrastruktur bisnis semakin mempersempit ruang gerak UMKM lokal dalam berpartisipasi pada rantai pasok pembangunan.

Sementara itu, gelombang masuk tenaga kerja migran dari berbagai daerah di Indonesia meningkat seiring dengan percepatan pembangunan IKN. Tenaga kerja ini umumnya memiliki keahlian di sektor konstruksi, digital, dan jasa, yang sangat dibutuhkan dalam tahap pembangunan. Meski penting bagi pembangunan, jika sebagian besar peluang ekonomi hanya dinikmati oleh pekerja migran, hal ini berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi antara kelompok lokal dan pendatang. Tanpa adanya kebijakan integrasi sosial dan ekonomi yang adil dan inklusif, kesenjangan ini bisa meluas dan berujung pada ketegangan sosial.



*Untuk* **BADAN OTORITA  
IBU KOTA NUSANTARA (OIKN)**

---

**1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, terutama Masyarakat Lokal Terdampak**

**A. Program “IKN Knowledge Hub”**

- Mendirikan pusat pelatihan keterampilan berbasis komunitas untuk memberdayakan tenaga kerja lokal dengan pelatihan di bidang seperti teknologi ramah lingkungan, konstruksi berkelanjutan, pertanian modern, dan industri kreatif.
- Mengimplementasikan sistem pelatihan langsung di tempat kerja (*On-the-Job Training*) yang dikaitkan langsung dengan proyek IKN, serta memberikan sertifikasi kompetensi yang diakui oleh pemerintah dan sektor industri kepada peserta, baik dari kelompok lokal maupun migran.

**B. Regulasi Ketenagakerjaan untuk Mencegah Ketimpangan**

Menerapkan aturan agar setiap proyek pembangunan di IKN wajib melibatkan tenaga kerja dari masyarakat lokal, untuk mencegah dominasi pekerja dari luar daerah. Regulasi ini perlu mempertimbangkan kondisi pendidikan dan keterampilan masyarakat setempat.



## 2. Mendukung Adaptasi Masyarakat terhadap Perubahan Ekonomi dan Sumber Daya Lahan

### A. Program “*IKN Economic Adaptation Fund*”

- Membentuk dana khusus untuk mendukung masyarakat terdampak yang kehilangan akses terhadap lahan dan pekerjaan, melalui pemberian hibah modal usaha dan pelatihan kewirausahaan.
- Memberikan pelatihan alternatif seperti agroforestri, ekowisata, atau industri berbasis lingkungan bagi masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan karena proyek pembangunan.

### B. Kebijakan “*Land-to-Job Conversion*”

Menyediakan kompensasi dalam bentuk peluang kerja di proyek-proyek IKN atau dukungan untuk pengembangan usaha baru, bagi masyarakat yang lahannya terkena dampak pembangunan.

## 3. Mewujudkan Pembangunan Inklusif dan Komunikasi Publik yang Efektif

### A. Program “*IKN Citizen Information Center*”

- Membentuk pusat informasi terpadu di lokasi-lokasi strategis di sekitar wilayah terdampak, guna menyediakan informasi dan dokumen kebijakan IKN dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
- Mendorong komunikasi berbasis komunitas, seperti diskusi publik dan penggunaan media sosial lokal, untuk menyampaikan informasi secara efektif.

### B. Platform Digital “*IKN Transparan*”

Menyediakan platform digital yang menampilkan peta interaktif zonasi IKN serta simulasi dampak proyek terhadap lahan milik warga.

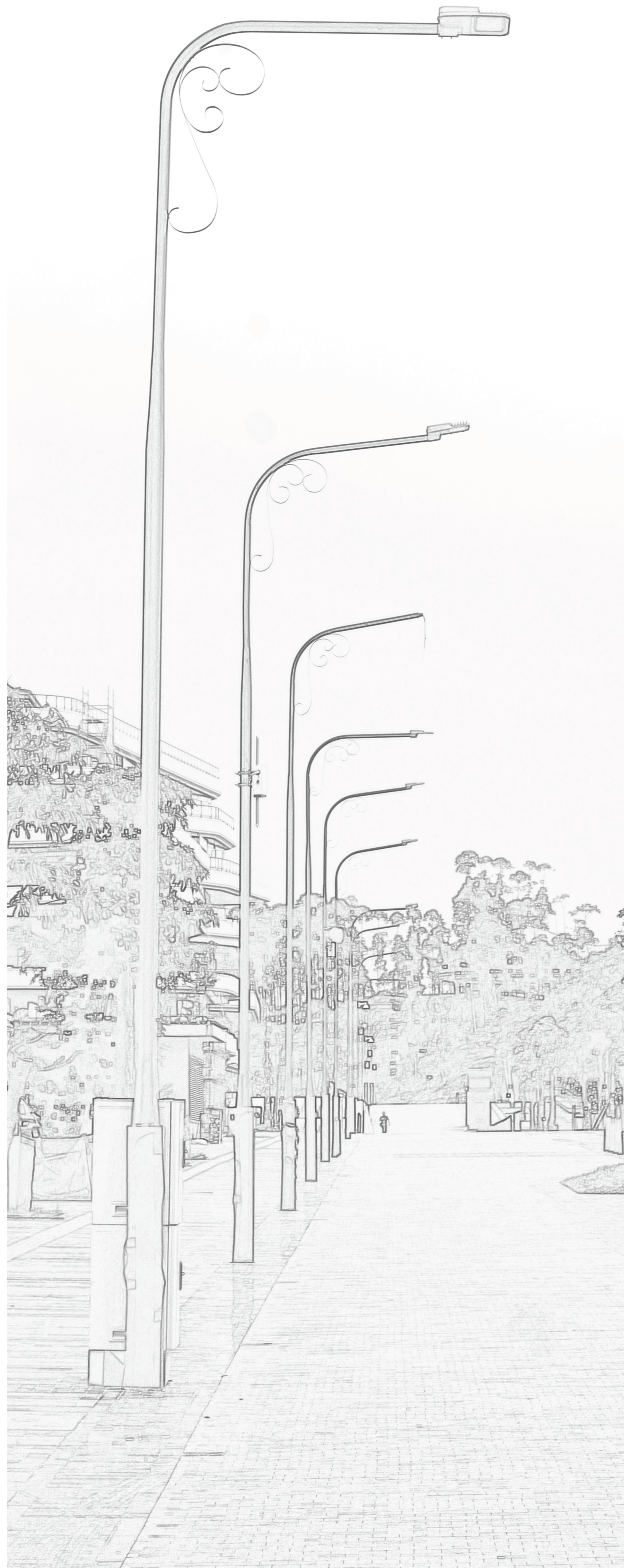
### C. Kebijakan “*IKN Public Hearing Mandate*”

- Mewajibkan pihak pemerintah dan investor untuk menggelar pertemuan terbuka dengan masyarakat lokal, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan, untuk menyampaikan informasi proyek dan menerima umpan balik langsung.
- Menyelenggarakan forum dialog interaktif di tingkat komunitas dasar, seperti di lingkungan RT/RW. pembangunan.

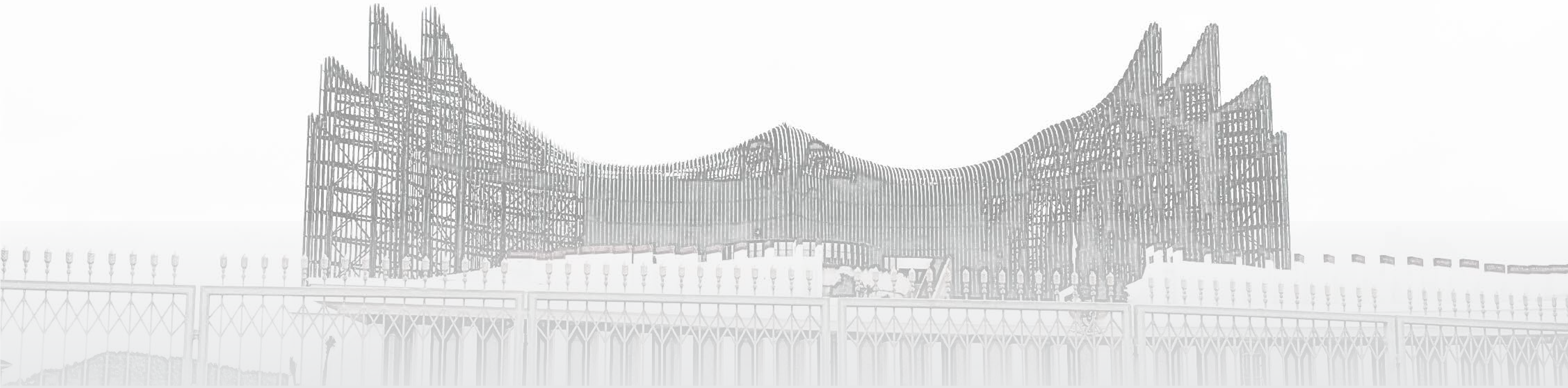
## 4. Meningkatkan Perlindungan dan Pendampingan UMKM Lokal

### A. Program “IKN Business Guardian”

- Mendirikan pusat layanan khusus untuk mendampingi UMKM lokal, yang mencakup akses terhadap bantuan hukum, perizinan usaha, dan pengembangan strategi bisnis.
- Memberikan fasilitas ruang kerja bersama (*coworking space*) secara gratis bagi pelaku startup lokal untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan usaha di lingkungan yang kompetitif.
- Menyediakan akses terhadap pembiayaan mikro dengan melibatkan kerja sama antara pemerintah dengan BUMN atau BUMD.
- Mengembangkan platform digital pasar IKN khusus untuk produk-produk lokal, yang mencantumkan penjual lokal terverifikasi dan mengajak partisipasi masyarakat dalam memanfaatkannya.
- Mewajibkan kontraktor yang terlibat dalam pembangunan IKN untuk menggunakan produk dan jasa dari UMKM lokal.



# *Untuk* PEMERINTAH DAERAH



## **1. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Kebutuhan IKN**

### **A. Kurikulum Pendidikan yang Menyesuaikan dengan Dinamika Sosial dan Ekonomi IKN**

- Mendorong penerapan kurikulum dual system (menggabungkan pembelajaran teori dan praktik) di tingkat SMK dan perguruan tinggi lokal, agar lulusan siap kerja di sektor strategis seperti kota pintar, energi terbarukan, dan industri berbasis ekosistem.

Memberikan dukungan insentif kepada

- perguruan tinggi untuk menjalin kemitraan dengan pelaku industri di IKN dalam rangka pengembangan riset dan pendidikan vokasional.

- Menggabungkan konsep sekolah berbasis alam dengan muatan budaya lokal Paser-Balik sebagai upaya pelestarian kearifan lokal dan sekaligus memperkuat keterampilan digital.

### **B. Beasiswa dan Insentif untuk Masyarakat Lokal dalam Pendidikan, Sertifikasi, dan Ketenagakerjaan**

- Menawarkan program beasiswa pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di IKN, sehingga masyarakat lokal dapat mengikuti pelatihan sertifikasi yang relevan dengan peluang kerja yang tersedia.
- Menjalinkan kolaborasi dan komunikasi yang intensif untuk mendukung penyerapan tenaga kerja dari daerah mitra ke sektor pekerjaan di IKN.

## 2. Menjaga Stabilitas Ekonomi Komunitas Lokal

### A. Pendampingan Khusus dalam Peralihan Ekonomi Petani dan Nelayan

Menghadirkan program pendampingan intensif yang mendorong pengembangan usaha berbasis potensi lokal, seperti agroforestri berkelanjutan, pertanian vertikal, atau perikanan ramah lingkungan.

### B. Insentif bagi UMKM Lokal agar Dapat Bersaing dengan Perusahaan Besar

Menyediakan kompensasi dalam bentuk peluang kerja di proyek-proyek IKN atau dukungan untuk pengembangan usaha baru, bagi masyarakat yang lahannya terkena dampak pembangunan.

### C. Program “IKN Business Accelerator”

- Menginisiasi program akselerator bagi pelaku UMKM lokal yang mencakup akses ke mentor profesional, dukungan modal ventura, serta perluasan jaringan pasar.
- Mengupayakan agar koperasi dan asosiasi lokal memiliki peran aktif dalam rantai pasok proyek pembangunan IKN.
- Mengalokasikan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk pelaku usaha di sekitar wilayah IKN, dengan fasilitas bunga 0% selama dua tahun pertama.

## 3. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan harus benar-benar diperkuat agar keterlibatan mereka menjadi bermakna dan berdampak langsung terhadap keberhasilan pembangunan IKN.



# Daftar Pustaka

- [1] Rijanta, R. dkk. (2022). Sustainability Challenges in the Development of Nusantara: the New Capital of Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [2] Susanti, Ari dkk. (2021). Following Frontiers of the 'Forest City': Profiling Ibu Kota Nusantara. Yogyakarta: Mega Cakrawala
- [3] <https://forestcity.sites.uu.nl/>
- [4] Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, termasuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Rencana Induk IKN, dan Rencana Tata Ruang KSN IKN
- [5] Memiliki luas kurang lebih 199.962 ha, mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
- [6] Saputra, Erlis dkk. (2022). Pinched Between the Bulldozer Wheels.: the Impact of the New City Development on People: Some Critical Notes From Indonesia's New Capital City. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [7] Rijanta, R. dkk. (2023). Rural Urbanization in a Resource Frontier Region: Lessons from Nusantara, the New Capital of Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [8] Saputra, Erlis dkk. (2023). Confronting the Frontiers of Nusantara Capital City: Place, Space, and People. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- [9] Rijanta, R., Saputra, E., Susanti, A., Kumalawati, R., Budiman, P.W., Musthofa, A., Wati, E.T. (2024). Greening the change: Macro-micro perspectives in sustainability challenges in Indonesian capital relocation. International Journal of Sustainable Development and Planning, Vol. 19, No. 5, pp. 1785-1793. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.190516>

